

PERAN POLITIK BEBAS AKTIF DALAM KERJA SAMA EKONOMI DUNIA: STUDI KASUS INDONESIA BERGABUNG DALAM FORUM INTERNASIONAL BRICS

Jayanti Herawati¹, Cinta Ayu Wandari², Tryana Muharam³, Noer Apptika Fujilestari⁴

jayantihera71075@gmail.com¹, cintaayuwandari05@gmail.com²,
tryanamuharam999@gmail.com³

Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia memainkan peran penting dalam kerjasama ekonomi dunia. Bergabungnya dengan berbagai forum internasional, termasuk BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Indonesia berusaha memperkuat posisinya di panggung global. Jurnal ini menganalisis kontribusi dan dampak Indonesia dalam BRICS, serta bagaimana prinsip politik bebas aktif mempengaruhi strategi kerjasama ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri, BRICS, Kerjasama Ekonomi.

ABSTRACT

As a country with the principle of free and active foreign policy, Indonesia plays an important role in world economic cooperation. Joining various international forums, including BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), Indonesia seeks to strengthen its position on the global stage. This journal analyzes Indonesia's contribution and impact in the BRICS, as well as how the principle of active free politics influences Indonesia's economic cooperation strategy.

Keywords: Foreign Policy, BRICS, Economic Cooperation.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan ini juga berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara berpartisipasi dalam dunia internasional atau isu-isu yang berkaitan dengan dunia secara global. Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik pula, dan seketika kepentingan nasional dibawa keluar maka kepentingan nasional inipun akan dikemas dalam politik luar negeri. Faktor internal maupun eksternal pastinya mempengaruhi perkembangan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri memiliki cara tersendiri yang identik dengan waktu/masa penerapannya serta tergantung pada siapa pemimpinya.

Dari sebagian besar masyarakat dunia, Indonesia dalam melakukan hubungan dengan bangsa lainnya selalu mengedepankan politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan bangsa mana pun di dunia ini. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Landasan konstitusional, yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD 1945, memberikan dasar bagi praktik politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kita dapat melihat betapa pentingnya bentuk politik ini bagi keberlangsungan politik luar negeri Indonesia.

BRICS adalah organisasi antarnegara yang terdiri dari lima negara: Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada awalnya, hanya empat negara yang tergabung, tetapi Afrika Selatan akhirnya bergabung pada tahun 2010. Lima negara yang tergabung ini memiliki kekuatan yang signifikan di dunia dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, militer, politik, dan ekonomi. BRICS didirikan pada tahun 2009, dengan gagasan utama

diberikan oleh Jim O'Neil. Ini terus berdiri hingga hari ini. Selain itu, organisasi ini dianggap memberikan perspektif optimistis dan positif kepada para investor pasar yang saat itu ragu karena serangan gedung World Trade Organization (WTO) di Amerika Serikat pada tahun 2001.

Aliansi BRICS menunjukkan bahwa mereka bersatu untuk kepentingan global dan bekerja sama. Selain itu, BRICS adalah kelompok yang berkembang pesat dengan tujuan menentang dominasi ekonomi oleh negara-negara Barat. BRICS telah menjadi wadah dan titik tengah untuk masalah global. Anggota-anggotanya berusaha untuk saling memahami dan mengatasi masalah global seperti ekonomi global, pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama antar-negara.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sebuah forum yang terdiri dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan potensi besar merupakan Langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) telah menjadi platform strategis bagi negara-negara berkembang untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan teknologi. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip politik bebas aktifnya. Jurnal ini akan mengeksplorasi tujuan politik bebas aktif dan bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Diharapkan analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang dihadapi Indonesia dalam politik dan ekonomi di tengah transformasi global yang cepat, serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber pada data-data sekunder yang valid dan telah dikaji secara literatur. Hal yang dibahas memunculkan dinamika deskriptif dan naratif yang menyajikan karakter data secara kualitatif. Analisis data yang dilakukan penulis menghasilkan esensi yang menjadikan metode kualitatif adalah pilihan yang tepat.

Keterampilan penulis berperan banyak dalam memahami teori dan data yang diambil dalam setiap sumbernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Politik Bebas Aktif Dalam Brics (Alasan Indonesia Bergabung Dengan Brics)

BRICS merupakan sekelompok negara berkembang dengan kekuatan ekonomi yang besar. Perkumpulan ini sendiri awalnya didirikan pada tahun 2009 oleh empat negara, Rusia, China, India, dan Brazil. Tahun berikutnya, Afrika Selatan bergabung dan membentuk akronim BRICS. Perkumpulan ini fokus pada bidang ekonomi, khususnya melawan hegemoni ekonomi negara-negara Barat. Isu kemunduran Amerika sebagai pemimpin ekonomi dunia telah berkali-kali mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti China, yang telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, merupakan salah satu penantang hegemoni model kekuasaan yang dipimpin AS. Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina telah memperburuk perpecahan antara negara-negara yang dipimpin AS dan BRICS. Sebaliknya, hubungan China dan Rusia belakangan ini semakin erat. Kecenderungan perpecahan dan mendekatkan ini menciptakan masalah meningkatnya polarisasi. Negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti kubu yang dipimpin AS atau berbalik dan menuju ke kubu baru yang dipimpin oleh Rusia dan China. Pasca perang Rusia-Ukraina, BRICS mulai melangsungkan ekspansinya. Pada 1

Januari 2024, BRICS akan menerima secara formal enam anggota barunya. Di antaranya, Argentina, Ethiopia, Saudi Arabia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia sebagai negara besar, anggota G20, dan memiliki potensi strategis tak luput juga dari peluang untuk bergabung bersama BRICS.

Pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini negara Indonesia masih mengkaji perihal keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diterima Indonesia apabila bergabung ke dalam BRICS. Negara tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, sampai sekarang negara belum menyatakan keberpihakannya. Salah satu alasan utama dari pertimbangan negara adalah prinsip bebas-aktif yang dianut Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara tetap mempertahankan posisinya yang “bebas menentukan pilihan dalam memandang suatu isu atau permasalahan”. Begitu pula dengan isu ekspansi BRICS. Kehadiran blok ekonomi tersebut sudah dianggap sebagai penantang dari model kekuasaan ekonomi yang telah ada, contohnya G7. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, hal itu dapat diartikan sebagai keberpihakan negara kepada kubu penentang kekuatan-kekuatan besar dan akan menyalahi prinsip fundamental dari kebijakan luar negeri Indonesia, bebas-aktif. Pada periode sekarang ini, politik bebas-aktif ditafsirkan sebagai “Indonesia bebas menjalankan kepentingannya tanpa mengikuti kubu-kubu besar yang ada”. Pasca reformasi, hubungan internasional Indonesia dicirikan dengan diplomasi menyeluruh ke setiap kelompok negara. Indonesia dengan bebas menjalankan hubungan ekonomi yang erat dengan China tanpa perlu menghapus hubungan diplomasi keamanan dengan Amerika Serikat. Dalam menerapkan sistem bebas aktif pula, Indonesia harus menerapkan kehati-hatian terhadap setiap kebijakan yang diambil. Inilah yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon perihal peluang keanggotaan BRICS. Selain dari segi ekonomi, Indonesia juga mempertimbangkan segi keseimbangan kekuatan dan geopolitik kawasan yang bisa jadi terganggu apabila negara sebesar Indonesia bergabung ke dalam salah satu kubu. (Ridwan, 2023).

Berbeda pendapat dengan presiden Joko Widodo justru pada saat ini dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto melalui kementerian luar negeri, Indonesia bergabung dalam forum kerja sama ekonomi global yaitu BRICS. Dikutip dalam (Jaya, 2024) Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, niat Indonesia bergabung ke BRICS bukan bermakna “ikut kubu tertentu”. Di sisi lain, pengamat mengingatkan BRICS sebenarnya bisa disebut “kubu perlawanan” karena berisikan negara-negara yang “tidak puas” dengan sistem yang dibangun Barat. Kurang dari satu minggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono hadir dalam Pada konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS plus di Kazan, Rusia dan pada 22-24 Oktober 2024 juga Indonesia secara resmi telah bergabung dengan 12 negara lainnya sebagai aliansi negara mitra BRICS. Selain Indonesia negara-negara Asia tenggara lainnya yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam turut bergabung menjadi mitra BRICS. (Nurfaidza, 2024). Dalam mengutarakan keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi itu. Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif.” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resmi”. keputusan ini merupakan langkah strategis yang perlu kita pahami dalam dunia global yang terus berjalan, dimana keanggotaan ini telah menawarkan beberapa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Hal ini tidak berarti bahwa Indonesia akan bergabung dengan kubu tertentu, namun kita akan berpartisipasi aktif di semua forum. Indonesia akan terus berpartisipasi dalam forum-forum lain dan melanjutkan konsultasi dengan negara-negara maju. Prabowo Subianto menekankan bahwa “Indonesia telah memilih jalur non-blok yang bebas dan aktif serta merupakan sahabat semua bangsa, namun kita memiliki prinsip anti-kolonial.”

Prabowo juga mengingatkan para pemimpin untuk tidak berpuas diri, mengingat meski G20 menerima hal tersebut, perekonomian Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. BRICS mewakili lima negara berkembang yang berpengaruh: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, pada dasarnya negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara maju alias Global North alias Barat Untuk memperkuat. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta semangat non-blok.

Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri menyebut Indonesia melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih. “Antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,”. Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS, dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Selain itu Indonesia juga melanjutkan keterlibatan atau engagement di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju. Tujuan Indonesia untuk bergabung ke BRICS dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjadi ketergantungan dengan negara mana pun khususnya negara-negara maju alias Global North, menurut Musa Maliki dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. “BRICS adalah gerakan nyata Global South, yakni kerja sama antar negara Selatan-Selatan untuk maju bersama sama saling tolong menolong (dalam menghadapi) banyak tantangan krisis global,” ujar Musa. Musa menyebut ada beberapa manfaat konkret yang akan diperoleh apabila Indonesia bergabung dengan BRICS yang pertama adalah akses arus perdagangan yang intens untuk menghindari krisis global. Kedua, embargo ekonomi negara maju tidak akan mempan terhadap negara-negara BRICS sehingga perekonomian kuat. Sirkulasi ekonomi politik dunia menjadi lebih berimbang antara negara Utara dan Selatan sehingga perekonomian tidak berputar 10 persen di negara maju saja.

2. Kontribusi Brics Terhadap Ekonomi Global

BRICS merupakan organisasi dengan sistem kerja sama multilateral dari kelima negara anggotanya, dan kelima negara tersebut termasuk kepada Emerging Market Economies (EMEs). Kemunculan BRICS dengan membawa seluruh gagasan dan prinsip barunya telah mengguncang sistem perekonomian global, hal ini diperkuat dengan terbentuknya New Development Bank (NDB) maupun Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang dinyatakan memiliki nilai kontribusi yang tinggi terhadap sistem keuangan internasional, terutama menjadi sarana alternatif baru disamping sarana-sarana yang sudah ada. Sebelum kemunculan BRICS, negara-negara berkembang mengarah kepada dua lembaga keuangan global sebagai kiblatnya, yaitu World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Kedua institusi tersebut pada saat itu menggunakan sistem kebijakan yang mengacu pada Washington Consensus, sebuah kebijakan yang mengarah kepada ideologi neoliberal. Pada implementasinya, sistem kebijakan tersebut mengalami kegagalan dalam membangun perekonomian bagi negara-negara berkembang. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan negara-negara berkembang diharuskan untuk mengikuti regulasi dan sistem pembangunan pada negara-negara maju sebagai syarat menerima pinjaman. Sistem kebijakan yang ditawarkan kedua institusi tersebut nyatanya tidak membuahkan hasil yang bagus untuk pembangunan negara-negara berkembang. Pada era 1961-1980, pendapatan PDB per kapita pada saat itu ada di kisaran 3,2% per tahun. Sedangkan pada era 1981-1999 yang menggunakan sistem kebijakan Washington Consensus, pendapatan PDB itu sekitar 0,7% per tahunnya. (Habib, 2016) dalam (Nurfiqi, 2024), selain itu, AS memiliki hak veto pada institusi IMF, hal ini menyatakan bahwa AS memiliki kuasa atas lembaga keuangan internasional. Pernyataan tersebut menjadi kekecewaan bagi negara-negara berkembang

dikarenakan sistem kebijakan yang dimiliki AS tidak tepat dengan sistem kebijakan di negara-negara berkembang. Walaupun hingga saat ini sebenarnya AS sudah kehilangan hak veto absolutnya, tetapi tidak bisa dipungkiri jika beberapa tahun kedepan bisa saja AS menyetujui kembali terkait reformasi kuota IMF. (Habib, 2016) dalam (Nurfiqi, 2024) ,Oleh karena itu, BRICS dinilai sangat besar kontribusinya oleh negara-negara berkembang, hal tersebut dikarenakan BRICS terbentuk atas dasar hasrat terhadap sistem keuangan internasional yang masih belum bisa menaungi negara berkembang secara efektif. BRICS membuat prinsip dan tatanan baru dalam dunia perekonomian, dan hal tersebut terhitung berhasil hingga saat ini. Kontribusi BRICS membuahkan hasil yang sepadan atas kehadiran New Development Bank (NDB) sebagai mekanisme alternatif dalam penyaluran dana infrastruktur baru dengan pemain-pemain di dalamnya yaitu negara-negara berkembang.

Maka dari itu, NDB adalah eksistensi dari kinerja BRICS yang dibentuk oleh negara berkembang untuk kemaslahatan dalam sistem keuangan internasional. BRICS memiliki sekitar 23% PDB dunia dan setengah dari populasi dunia, negara-negara anggota BRICS berupaya mengurangi dominasi dari sistem ekonomi barat. Negara-negara anggota BRICS pada tahun 2023 ini akan menyumbangkan sekitar 32,1% PDB global. Nominal negara anggota BRICS terus naik kisaran 16,9% dari tahun 1995 hingga saat ini, bisa dihitung bahwa dengan kurun waktu 28 tahun PDB BRICS mengalami surplus yang tinggi hampir 100%. Jika dibandingkan dengan organisasi internasional seperti G7, BRICS memiliki skema lebih unggul dari tahun ke tahun, sedangkan G7 terus mengalami degradasi ekonomi hingga tahun 2023 ini. (CNBC Indonesia, 2023) Sejak KTT BRICS pertama pada bulan Juni 2009 dan dialog politik pertama pada bulan September 2006, organisasi BRICS telah mencapai banyak hal. Negara-negara BRICS antara lain telah meluncurkan Contingent Reserve Arrangement (CRA) dan New Development Bank(NDB) dalam tujuh tahun sejak KTT perdana. Hal ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang dicapai dalam waktu yang relatif singkat. (Mminele, 2016) dalam (Nurfiqi, 2024) , Sebagaimana dicatat oleh beberapa analisis, pembentukan NDB BRICS merupakan titik balik dalam kerja sama kelompok tersebut dan bukti “kedewasaan” mereka di sektor keuangan pembangunan. Pihak lain berpendapat bahwa NDB didirikan sebagai perlawanan terhadap sistem Bretton Woods, tatanan ekonomi internasional pasca-Perang Dunia II. Namun seperti yang telah dinyatakan oleh banyak anggota BRICS lainnya, salah satu tujuan NDB adalah untuk memajukan kerja sama Selatan- Selatan dan lebih memenuhi kebutuhan negara-negara miskin dengan memajukan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Mengingat hal ini, NDB harus dilihat sebagai peningkatan dari institusi Bretton Woods yang ada saat ini dan bukan sebagai saingan atau pesaing. Selama 20 tahun terakhir, persentase perdagangan global BRICS meningkat hampir tiga kali lipat. Terlepas dari kenyataan bahwa total impor dan ekspor global menurun, volume impor dan ekspor BRICS telah meningkat dari tahun 2008 hingga 2016.

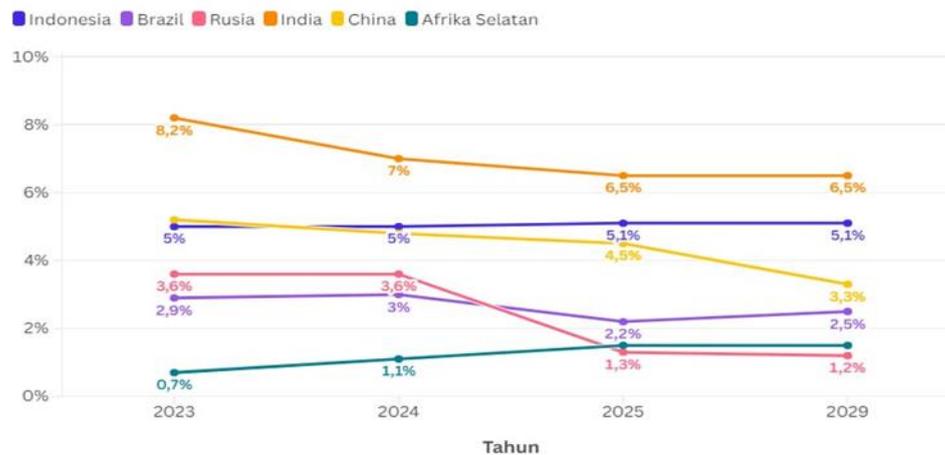
Melalui pertumbuhan perdagangan dan investasi, kini terdapat lebih banyak konektivitas dalam BRICS serta antara BRICS dan Negara Berkembang. Jika tingkat investasi di negara-negara BRICS meningkat, kontribusi BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi global hingga tahun 2030 diperkirakan akan lebih besar. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi akan dihasilkan dari pertumbuhan BRICS yang lebih cepat, khususnya di negara-negara EMDC. Selain itu, BRICS juga telah memberikan kontribusi besar dalam memerangi kemiskinan global. BRICS masih perlu terus berkembang guna mengurangi kesenjangan dan kemiskinan global. (Reddy, 2017) dalam (Nurfiqi, 2024). Inisiatif BRICS untuk memajukan tujuan pembangunan internasional lainnya mungkin memiliki potensi yang cukup signifikan. Selain peran perdagangan dan investasi BRICS dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kerja sama pembangunan BRICS dan inisiatif untuk mengubah

sistem ekonomi global agar lebih mendukung EMDC dapat memainkan peran penting dalam menunjukkan komitmen BRICS terhadap pembangunan internasional.

Terdapat peluang untuk mengambil langkah-langkah baru yang dapat mendukung lebih pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengingat semakin besarnya pengaruh ekonomi BRICS dan semakin pentingnya hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara EMDC lainnya. Penguatan hubungan ekonomi, misalnya, memungkinkan tindakan untuk memperkuat mata uang cadangan alternatif. Melalui tindakan yang bijaksana dan penuh perhitungan, BRICS juga dapat mendorong terciptanya pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. (Reddy,2017) dalam (Nurfiqi, 2024).

3. Pengaruh gabungannya Indonesia dengan Brics

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota BRICS dan Indonesia



Sumber: International Monetary Fund (IMF)

GoodStats

Menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan cenderung stabil di sekitar 5%-5,1%. Di antara anggota utama BRICS, India dan China memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan India diproyeksikan mencapai 7% pada 2024 dan China 4,8%. Sebaliknya, Rusia dan Brasil memiliki proyeksi pertumbuhan yang lebih moderat, masing-masing 3,6% dan 3%. Afrika Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah pada kisaran 1,1% untuk 2024. Indonesia diperkirakan akan tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dan dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia mungkin akan menikmati akses lebih besar ke pasar negara berkembang dan potensi peningkatan perdagangan dengan anggota BRICS lain. Ini penting untuk mengimbangi ketergantungan pada ekonomi negara-negara Barat, terutama dengan peluang akses ke pasar non-tradisional di Amerika Selatan dan Afrika. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa Indonesia mungkin perlu bersiap menghadapi ketegangan dengan negara Barat, terutama AS, yang mungkin melihat keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai pergeseran ke arah kubu non-Barat. Indonesia berpotensi dianggap sebagai bagian dari kelompok revisionis, yang berupaya merombak tatanan dunia yang didominasi negara-negara Barat.

4. Keuntungan Ekonomi dan Kerja Sama di Bidang Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata

Bergabung dengan BRICS dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama melalui peningkatan perdagangan dengan negara-negara Global South. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, BRICS akan membuka akses ke pasar non-tradisional seperti Amerika Selatan dan Afrika. Pada tahun 2022, total perdagangan antara Indonesia dan negara anggota BRICS akan mencapai \$93,16 miliar yang sebagian besar

berasal dari perdagangan dengan Chin. Namun, perdagangan dengan negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan masih relatif rendah, sehingga memberikan potensi yang besar untuk dieksploitasi. Di sektor energi, kehadiran anggota baru BRICS seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab meningkatkan pengaruh kelompok tersebut di pasar minyak global. Negara-negara BRICS saat ini memproduksi sekitar 43% minyak mentah dunia, dengan Arab Saudi dan Rusia memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang energi dan teknologi ramah lingkungan, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pakar Strategi Pembangunan Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak hanya akan memperluas jaringan ekonominya; Namun hal ini juga menghadirkan peluang besar di sektor pariwisata. Masuknya Indonesia ke negara-negara ekonomi besar seperti China, India, dan Brasil dapat meningkatkan arus wisatawan dari negara-negara tersebut.

Wisatawan dari negara-negara BRICS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pariwisata global, dan kehadiran Indonesia di kelompok tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pengunjung dan memperkuat sektor pariwisata nasional. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, keanggotaan BRICS juga membuka peluang investasi pada infrastruktur pariwisata berkelanjutan, termasuk pengembangan destinasi ramah lingkungan dan perlindungan wisata budaya dan alam. Indonesia juga menawarkan peluang untuk mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata. Memberikan pengalaman pariwisata meningkatkan dan memperkuat daya saing kita di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pariwisata Indonesia dalam skala global, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan devisa negara. (Al-Fajri, 2024).

KESIMPULAN

Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, menunjukkan komitmen untuk berperan dalam kerja sama ekonomi dunia secara konstruktif dan independen. Meskipun bukan anggota resmi BRICS, Indonesia tetap memanfaatkan kebijakan bebas aktifnya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha menjaga kemandirian politik luar negerinya sambil mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mengoptimalkan peluang kerja sama di sektor perdagangan, investasi, dan infrastruktur yang ditawarkan oleh BRICS.

Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS, dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Selain itu Indonesia juga melanjutkan keterlibatan atau engagement di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju.

Kebijakan bebas aktif memungkinkan Indonesia terlibat dalam berbagai kerja sama ekonomi, kehadiran Indonesia di kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan serta memperkuat sektor pariwisata nasional. Selain peningkatan jumlah kunjungan, keanggotaan di BRICS membuka peluang investasi di infrastruktur pariwisata berkelanjutan. Kerja sama dalam promosi wisata dan ekonomi kreatif bersama anggota BRICS lainnya juga menawarkan kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata, meningkatkan pengalaman wisatawan, dan memperkuat daya saing di tingkat internasional, termasuk dengan negara-negara BRICS. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat mendorong kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global yang terus berubah, seperti persaingan kekuatan besar, ketidakpastian ekonomi global, dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga mencerminkan peran aktif.

Indonesia dalam memperkuat peran negara-negara berkembang di kancah ekonomi internasional, serta menjaga prinsip keadilan dan multipolaritas dalam tatanan ekonomi dunia.

Secara keseluruhan, pendekatan politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk terlibat dengan BRICS secara selektif dan pragmatis, memperkuat posisinya di arena global tanpa terikat pada satu kubu kekuatan besar.

DAFTAR PUSTAKA

Academia.Edu

Al-Fajri, S. (2024, November 1). Retrieved from Goodstats: <https://goodstats.id/article/akankah-ada-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-bergabung-dengan-brics-00xpD>

Bank, W. (2020). GDP and Population Data. World Bank Database. Hatta, M. (1948). Mendayung Diantara Dua Karang.

Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 4.

Jaya, I. (2024, Oktober 28). Retrieved from KOMPAS.COM: <https://www.kompas.com/global/read/2024/10/28/141022770/apa-itu-brics-dan-kenapa-indonesia-ingin-gabung?page=all>

Jurnal Ilmiah Multidisiplin, VOL.01. No.02.

Katon, Baiq Giri Sekar. (2019). POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA.

NDB. (2021). New Development Bank (NDB) . Retrieved from Annual Report: <https://www.ndb.int>

NDB. (2021). New Development Bank (NDB) . Retrieved from Annual Report: <https://www.ndb.int>

Nurfaidza, H. (2024). Bergabungnya Indonesia ke BRICS: Dampak terhadap Perekonomian Nasional. Kumparan.

Nurifqi, M. W., Lubis, F. M., & Marsingga, P. (2024). Pengaruh Organisasi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam Kerja sama Ekonomi Global. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 18448-18460.

Ridwan, K. F. (2023). Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia:.

Statements, B. J. (2022). Declaration of the BRICS Summit. BRICS.

Statements, B. J. (2022). Declaration of the BRICS Summit. BRICS.

Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Kyberology: Journal of Government Studies, 2(2), 70-95.